

STUDI PEMEKARAN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DAN PEMILIHAN IBUKOTA KECAMATAN PADA KECAMATAN PEMEKARANNYA

Oleh :

Dr. Hj. Sri Hayati, M.Pd.

Drs. Ahmad Yani, M,Si.

Abstrak

PENDAHULUAN

Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak luas terhadap tata laksana pemerintah daerah. Dasar filosofi keseragaman berubah menjadi filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. Dari paradigma administratif yang mengutamakan dayaguna dan hasilguna menjadi paradigma demokratisasi, partisipasi masyarakat serta pelayanan. Tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan berubah menjadi pelayan masyarakat. Dari dominasi eksekutif (*executive heavy*) berubah ke arah dominasi legislatif (*legislative heavy*). Pengaturan terhadap desa yang terbatas, menggantikan pengaturan yang luas dan seragam secara nasional.

Berbagai perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, mencakup pula perubahan mengenai kedudukan kecamatan dan camat. Di dalam pasal 1 huruf (m) UU Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota" Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu bahwa kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan seperti pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, melainkan wilayah kerja. Sebagai wilayah kerja, tentu saja konsepsinya bukan lagi suatu wilayah kekuasaan camat tetapi merupakan areal tempat camat bekerja. Selain itu, camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan seperti masa UU Nomor 5 Tahun 1974 tetapi camat berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Perubahan kedudukan kecamatan membawa dampak pada kewenangan yang dijalankan oleh camat. Camat tidak lagi memiliki kewenangan atributif sebagaimana diatur pada pasal 80 dan 81 UU Nomor 5 Tahun 1974. Di dalam pasal 66 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 1999 Camat memiliki kedudukan menerima pelimpahan sebagian dari kewenangan

pemerintahan Bupati/Walikota. Artinya kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Luas atau sempitnya delegasi kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/ Walikota bersangkutan.

Adanya perubahan paradigma otonomi daerah sampai ke tingkat kecamatan membuka peluang pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran di sejumlah kecamatan. Pemekaran kecamatan dianggap mendesak agar pengelolaan daerah semakin mudah. Bupati dan walikota banyak yang tertarik untuk melakukan pemekaran kecamatan dalam rangka mempercepat pembangunan. Dari adanya pemekaran kecamatan, kegiatan susulan lainnya adalah penempatan lokasi pusat kecamatan agar optimal dalam pelayanan publik. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara normatif menggariskan bahwa kecamatan dan kelurahan adalah merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan yang dapat dilakukan oleh tingkat kecamatan atau kelurahan, tidak perlu "berduyun-duyun" ke tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, lokasi kantor kecamatan yang tepat adalah yang mudah dijangkau oleh seluruh warga masyarakat desa atau kelurahan setempat, memberi dampak efektif dan efisien bagi masyarakat, dan tentu saja dapat memotong birokrasi yang berbelit-belit.

Dengan asumsi yang dibangun di atas, sebuah kecamatan yang terlalu gemuk dengan jumlah desa/kelurahan yang banyak tidak lagi efektif dan efisien. Studi ini pada intinya adalah merupakan upaya ilmiah dalam melakukan pemekaran kecamatan pada kasus Kecamatan Soreang dan memilih salah satu desa/kelurahan hasil pemekaran untuk dijadikan pusat pemerintahan kecamatan baru. Semangat dari studi ini adalah dengan penempatan lokasi pelayanan publik yang tepat, diharapkan secara bertahap dapat membangun wilayah secara lebih merata dan meningkatkan pelayanan publik.

Seperti halnya Kecamatan Soreang yang memiliki 18 desa/kelurahan perlu dilakukan pemekaran. Setelah melakukan pemekaran, pada akhirnya perlu memilih salah satu desa/kelurahan yang layak dijadikan pusat kecamatan.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam studi ini diajukan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana persebaran potensi pada masing-masing desa di Kecamatan Soreang?
2. bagaimana skenario pemilihan dari alternatif untuk pemekaran Kecamatan Soreang?
3. dimanakah lokasi desa yang paling baik untuk dijadikan ibukota kecamatan Soreang baru hasil pemekaran?

B. Tujuan

Tujuan studi ini adalah untuk:

1. mengetahui persebaran potensi pada masing-masing desa di Kecamatan Soreang.
2. mengajukan skenario dalam pemilihan alternatif untuk pemekaran Kecamatan Soreang.
3. menentukan lokasi desa yang paling baik untuk dijadikan ibukota kecamatan Soreang baru hasil pemekaran.

C. Hasil dan Manfaat

Hasil yang diharapkan dari studi adalah:

1. mengajukan alternatif pemekaran Kecamatan Soreang sesuai dengan pertimbangan yang rasional
2. mengajukan lokasi desa yang paling baik untuk dijadikan ibukota Kecamatan Soreang baru hasil pemekaran

Manfaat dari studi ini adalah:

1. memudahkan bagi pengambil keputusan dalam menentukan pilihannya untuk memekarkan Kecamatan Soreang dan atau menentukan lokasi Ibukota Kecamatan Soreang yang baru hasil pemekaran.
2. hasil studi merupakan dokumen atau naskah akademik dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban akademik terhadap publik.

Dalam hal pemekaran kecamatan, pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 pembentukan wilayah kecamatan didasari oleh semangat asas dekonsentrasi, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999, pembentukan kecamatan cukup dilakukan oleh Peraturan Daerah. Di dalam pasal 126 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa: "Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah". Pada pasal 4 ayat (4) UU tersebut dikemukakan bahwa pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan suatu kecamatan dapat dimekarkan adalah 5 (lima) tahun.

Pedoman pembentukan kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 memiliki kriteria yaitu sebagai berikut:

TABEL KRITERIA PEMBENTUKAN KECAMATAN

Indikator	Kriteria
1. Jumlah Penduduk	
Wilayah Jawa & Bali	Minimal 10.000 Jiwa
Wilayah Sumatera & Sulawesi	Minimal 7.500 jiwa
Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua	Minimal 5.000 ,jiwa
2. Luas Wilayah	
Wilayah Jawa & Bali	Minimal 7,5 km ²

Wilayah Sumatera & Sulawesi	Minimal 10 km ²
Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua	Minimal 10 km ²
3. Jumlah desa/kelurahan	Seragam untuk semua yaitu 4 desa/Kelurahan

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000

Selain ketentuan dalam pembentukan kecamatan, ketentuan lainnya adalah mengelompokkan tipologi kecamatan. Hal ini dilakukan karena wilayah kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang jumlahnya cukup banyak dan pada umumnya dikelola secara seragam. Padahal beban pekerjaan dan tanggung jawab untuk masing-masing jelas berbeda-beda. Untuk memperkecil besarnya perbedaan, secara realistis, logis dan rasional diukur kinerjanya secara obyektif yaitu sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan yaitu:

1. jumlah penduduk (JP)
2. luas wilayah (LW)
3. jumlah kelurahan/desa di wilayahnya (JKID);
4. sarana transportasi dan komunikasi (STK);
5. kawasan potensial yang dapat dikembangkan (KP);
6. karakteristik wilayah (KW);
7. pola pendelegasian kewenangan (PPK).

Secara sederhana pembuatan tipologi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TK = f (JP, LW, JKID, STK, KP, KW, PPK)$$

Namun demikian, untuk menentukan tipologi kecamatan dibuat tidak seragam juga secara nasional, karena tidak akan menggambarkan bobot pekerjaan yang sebenarnya. Masing-masing variabel diberi bobot menurut tingkat kepentingannya di kabupaten/kota. Artinya kriterianya berlaku secara lokal dan digunakan untuk kepentingan pragmatis semata. Setiap daerah Kabupaten/Kota memiliki skala tertentu dalam penilaian.

Untuk dapat menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan dan Bupati/ Walikota yang didelegasikan kepada camat, pejabat camat perlu didukung oleh organisasi. Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dibedakan antara Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan, Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana serta Badan dan atau Kantor sebagai unsur penunjang.

Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian

perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Badan dan atau Kantor sebagai unsur penunjang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

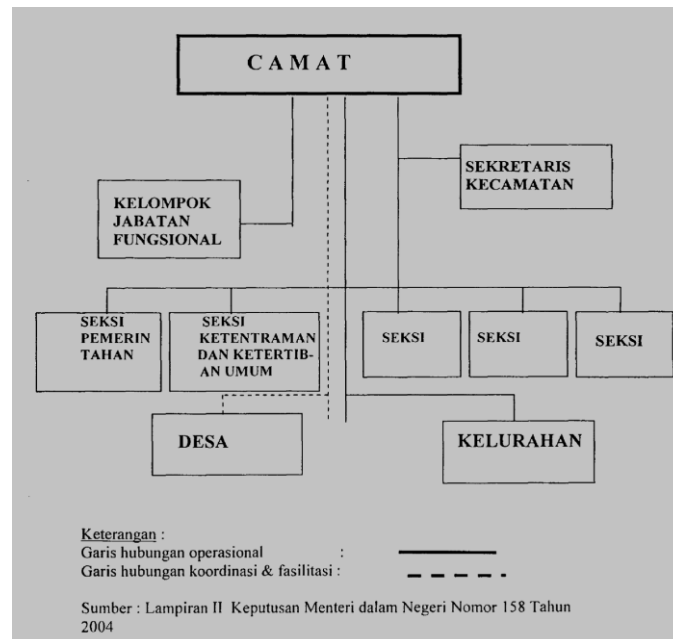
PP Nomor 8 Tahun 2003 tidak secara eksplisit menyebutkan kedudukan kecamatan dan kelurahan tetapi jika dilihat dari karakteristik pekerjaan yang dijalankan oleh Camat yang bersifat operasional yakni melayani masyarakat secara langsung, kecamatan lebih sesuai dimasukkan ke dalam kategori unsur pelaksana. Untuk membedakannya dengan Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan yang bersifat teknis, maka kecamatan lebih tepat disebut unsur pelaksana kewilayahan. Dinas Daerah menjalankan kewenangan yang bersifat teknis tertentu seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Camat dapat menjalankan kewenangan pemerintahan apapun yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepadanya dengan batas wilayah kerjanya — sepanjang tidak bersifat sangat teknis.

Karakteristik kewenangan pelayanan yang dapat dijalankan oleh Camat yaitu sebagai berikut:

- a. Mudah, dalam arti tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi;
- b. Sederhana; dalam arti tidak memerlukan prosedur yang banyak;
- c. Murah; dalam arti pembiayaannya lebih murah bagi masyarakat dibanding apabila ditangani oleh Dinas teknis di ibukota Kabupaten/Kota;
- d. Terjangkau oleh masyarakat setempat, baik dilihat dan lokasi maupun waktunya.

Mengingat kewenangan yang didelegasikan kepada Camat kemungkinan tidak seragam di setiap daerah, maka organisasi kecamatan yang dibentuk seyogyanya mengikuti jenis dan banyaknya kewenangan yang didelegasikan tersebut. Menurut pasal 12 ayat (5) pp Nomor 8 Tahun 2003, pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sekarang telah terbit lagi Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Pada pasal 5 Kepmendagri tersebut dikemukakan bahwa susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomenklaturinya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan
6. sesuai kebutuhan Daerah;
7. Kelompok jabatan fungsional.



Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 maupun Kepmendagri Nomor 58 Tahun 2004, disebutkan bahwa jumlah seksi sebanyak-banyaknya adalah lima buah. Artinya, jumlah seksi di kecamatan tidak harus lima buah melainkan tergantung pada beban kerja masing-masing kecamatan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan pembuatan tipologi kecamatan untuk menentukan bobot pekerjaan dan besaran organisasinya. Tipologi ini kemudian diikuti dengan pengalokasian besarnya biasa, jumlah pegawai serta jumlah logistik yang sesuai dengan tipologinya.

A. Aspek Geografis untuk Batas Kecamatan

Batas Negara atau batas wilayah lebih kecil seperti kecamatan, alangkah baiknya jika pertama kali memperhatikan batas alam seperti punggung pegunungan, sungai, danau, atau laut. Secara teoritis batas wilayah administratif dapat diklasifikasikan berdasar batas etnis/kultur dan batas alam.

1. Batas etnis/kultur

Beberapa ahli geografi politik berpendapat bahwa kriteria kesukuan merupakan kriteria yang efektif/sesuai untuk menentukan *boundary internasional*, dengan kata lain boundary harus tergambar memisahkan orang yang sama secara budaya, wujudnya berupa bahasa dan ras/kesukuan yang berbeda. Batas ini bagi negara Indonesia bukanlah pilihan yang baik karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Batas alam

Batas alam yang dapat dijadikan batas wilayah administratif antara lain gunung dan pegunungan, sungai, laut dan danau. Batas ini mudah dilihat dan memudahkan penyelesaian masalah jika terjadi konflik perbatasan. Sungai menunjukkan keadaan yang nyata dan digunakan sebagai kenampakan boundary, tetapi terdapat beberapa masalah pada

penggunannya sebagai boundary ketika terjadi konflik dalam penggunaan air oleh dua wilayah di tepi sungai.

United Nations Development Programme (UNDP) yang merupakan salah satu badan internasional yang bernaung di bawah organisasi PBB setiap tahun mengumumkan kedudukan negara-negara di dunia berdasarkan peringkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Dalam laporan HDI tahun 2004, Indonesia berada di peringkat 111 dari 175 negara. Suatu posisi yang relatif rendah karena di bawah negara Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan kualitas kehidupan manusia Indonesia lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" lainnya seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109), dan Aljazair (108). Dalam sistem publikasinya, UNDP mengklasifikasi negara-negara dalam tiga kelompok yaitu kelompok tinggi (*high human development*) dengan indeks di atas 0,800; kelompok menengah (*medium human development*) dengan indeks 0,501 sampai 0,800; dan kelompok rendah (*low human development*) dengan indeks di bawah 0,500.

Rendahnya kualitas hidup bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam hal ini berperan utama untuk mengatur (regulator), memberi pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu juga ditambah dengan perumusan visi yang jelas, komitmen yang kuat dan penegakan disiplin agar peran yang utamanya dapat terlaksana.

Untuk membangun visi, Indonesia kata Ki Supriyoko (2005) perlu belajar dari Malaysia. Negara tetangga ini sejak pertengahan 1990-an sudah membuat visi yang dikenal dengan Malaysia 2020. Dalam visinya, Malaysia menggambarkan bahwa program pendidikan adalah hal yang paling utama. Untuk meraih visi tersebut, program peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan sehingga memasuki era abad 21 Malaysia telah menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia. Sebelum tahun 1990-an, banyak mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun Malaysia telah menjadi tempat belajar bagi anak-anak Indonesia.

Dalam hal komitmen, lebih lanjut Ki Supriyoko (2005) menganjurkan untuk belajar dari Thailand. Pada tahun 1997, Thailand dan Indonesia sama-sama didera krisis, kedua negara tersebut porak poranda. Namun dengan komitmen yang kuat, ternyata Thailand lebih mampu mengakhiri krisis. Komitmen ini diimplementasi ke tingkat operasional misalnya dalam melakukan pertemuan seremonial kenegaraan, seminar, lokakarya, yang biasa dijalankan dengan mewah ternyata cukup dilakukan secara sederhana; tidak ada hotel mewah, jauh dari biaya tinggi. Karena komitmennya untuk keluar dari krisis, maka berkembanglah Thailand menjadi negara yang lebih maju dan keluar dari krisis. Sementara Indonesia sampai saat ini masih bergulat dengan krisis yang belum berakhir.

Dalam hal kedisiplinan, bangsa Indonesia perlu juga belajar dari Singapura. Negara kecil ini dapat maju dan sekaligus menjadi pusat perhatian dunia karena kedisiplinan di berbagai bidang dijunjung tinggi termasuk dalam

penataan ruang dan pengelolaan kota. Wisata belanja yang sangat terkenal di Asia Tenggara adalah di Singapura yang memiliki keindahan kota.

Dalam rangka meraih sukses seperti di negara-negara tetangga kita, Indonesia secara terintegrasi terus berupa untuk melakukan penataan di segala bidang. Hal yang paling fundamental dan berjangka panjang adalah penataan sistem sirkulasi penduduk dalam sebuah ruang atau wilayah. Dengan penataan ruang yang baik, pengeluaran biaya atau ongkos transportasi masyarakat dapat ditekan. Karena ongkos transportasi lebih murah maka biaya kehidupan lainnya seperti bahan pangan, pendidikan, dan lain-lain dapat ditekan. Dari sudut pandang ilmu perencanaan (planologi), untuk meraih keteraturan hidup penduduk dari suatu kota adalah tata ruang yang baik. Dengan tata ruang yang baik dan atau penempatan lokasi pelayanan publik yang tepat akan mendidik masyarakat untuk dapat hidup teratur. Dari kehidupan yang teratur diharapkan tumbuh aspek disiplin pada masyarakat.

Dalam rangka belajar dari negara-negara tetangga tersebut, Kabupaten Bandung dalam hal ini ingin memperkuat dalam visi, kukuh dalam komitmen dan berdisiplin dari mulai urusan yang sangat kecil sampai yang besar. Hal yang "dianggap kecil" oleh sebagian orang tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar di kemudian hari adalah penempatan lokasi-lokasi layanan publik yang strategis dan memiliki kerangka tata ruang di masa yang akan datang.

Penempatan lokasi layanan publik yang dimaksud adalah pemekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan penempatan pusat kecamatan dari pemekaran Soreang tersebut. Tujuan akhir dari itu semua adalah agar pemerintah mampu menjalankan fungsinya dan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

D. Metode Kajian

Metode pengkajian yang digunakan untuk mengkaji pemekaran kecamatan di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan deskriptif dengan metoda survei. Populasi penelitian ini adalah Kecamatan Soreang berikut desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut.

Pengkajian pemekaran kecamatan sebagian besar menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, hasil wawancara, studi kepustakaan, dan menelaah serta menganalisis literatur baik berupa buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Metode analisis untuk melihat kajian potensi pemekaran kecamatan Soreang menggunakan metode analisis:

2. Metode Penghitungan (scoring) per indikator untuk menyusun kategori penilaian berdasarkan skala tertentu dan ditetapkan menurut klasifikasi lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus.

3. Metode Penghitungan Cost and Benefit Analysis untuk menyusun perkiraan dampak yang timbul pascapenataan kecamatan, termasuk langkah-langkah antisipasi bagi peningkatan kapasitas kecamatan dan desakelurahan.
4. Metode analisis kualitatif untuk menginterpretasikan kondisi sosial dan politik di kecamatan baru hasil pemekaran.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

B. Pedoman Perundang-undangan

BAB II

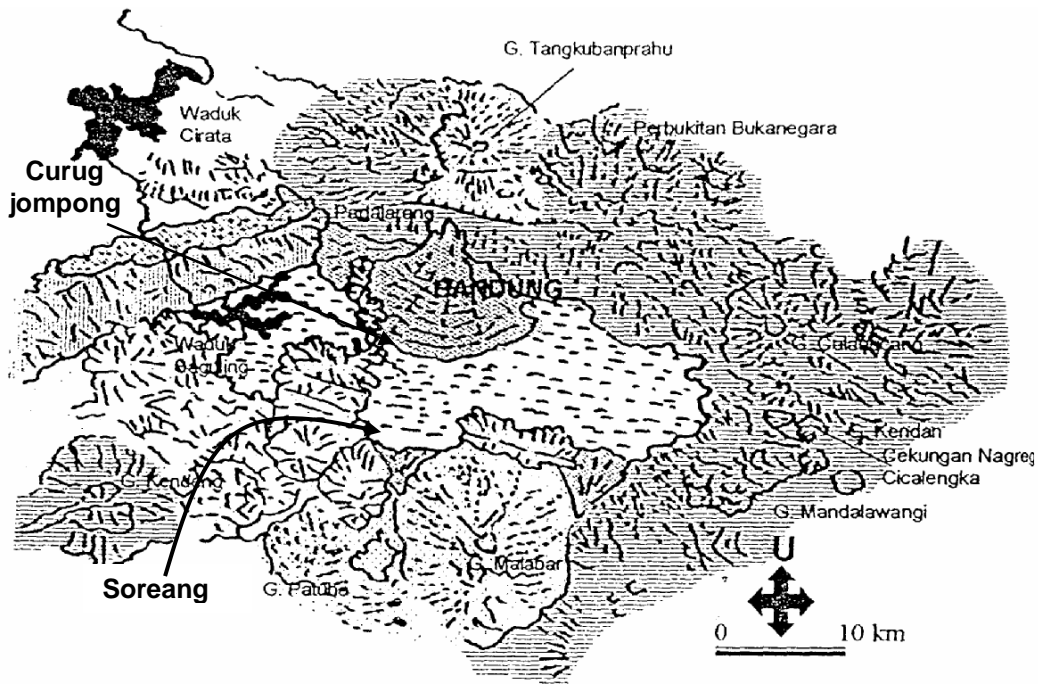
TINJAUAN UMUM KECAMATAN SOREANG

A. Aspek Alamiah

Soreang secara geomorfologis berada di bagian selatan Cekungan Bandung dan di tepian dari danau purba Bandung. Berdasarkan peta geologis, Soreang berada di sekitar dataran aluvial yang terisi oleh sedimen-sedimen berciri *volkanoklastik* yang diendapkan dalam lingkungan danau. Secara hidrologis, Soreang termasuk pada DAS Ci Widey yang akan bergabung dengan Ci Tarum. Hasil sebuah pengeboran yang dilakukan pada dataran di daerah Bandung bagian timur, menunjukkan bahwa endapan pengisi Cekungan Bandung masih didapati hingga kedalaman 100 meter. Umur endapan terdalam pada lubang pengeboran tersebut adalah 135 ribu tahun yang lalu (Dam, 1994). Diduga tebal endapan ini bisa mencapai 200-an meter.

Dataran Danau Bandung adalah dataran yang menjadi penciri Bandung sehingga dikenal sebagai Dataran Tinggi Bandung atau Plateau Bandung. Sebutan untuk ini dianggap wajar oleh para ahli mengingat elevasi terendah di dataran banjir Ci Tarum di daerah Dayeuhkolot mempunyai ketinggian 650 m dpl. Dataran ini dapat didelineasi oleh kontur 700 m. Adapun Soreang berada pada ketinggian sekitar 745 – 800 m dpl.

Kontur 700 m dpl itu akan memutar sebagai *lup* tertutup di sekeliling Bandung dengan lebar yang luas di bagian timur, menyempit pada pematang tengah Kompleks Selacau-Lagadar di selatan Cimahi, dan baru terbuka pada lembah Ci Tarum di Punggungan Pr. Kiara - Pr. Larang, Perbukitan Saguling (Gambar 2.1). Secara geografis, Dataran Danau Bandung dapat dibedakan ke dalam dua bagian besar, yaitu Dataran Bandung yang berada di sebelah timur, dan Dataran Batujajar-Saguling di bagian barat. Kedua bagian ini dipisahkan oleh pematang tengah yang merupakan kompleks perbukitan intrusif dan sisa-sisa gunungapi Pliosen yang menyebar dari Soreang hingga selatan Cimahi. Penyempitan paling ekstrim terdapat di Curug Jompong.

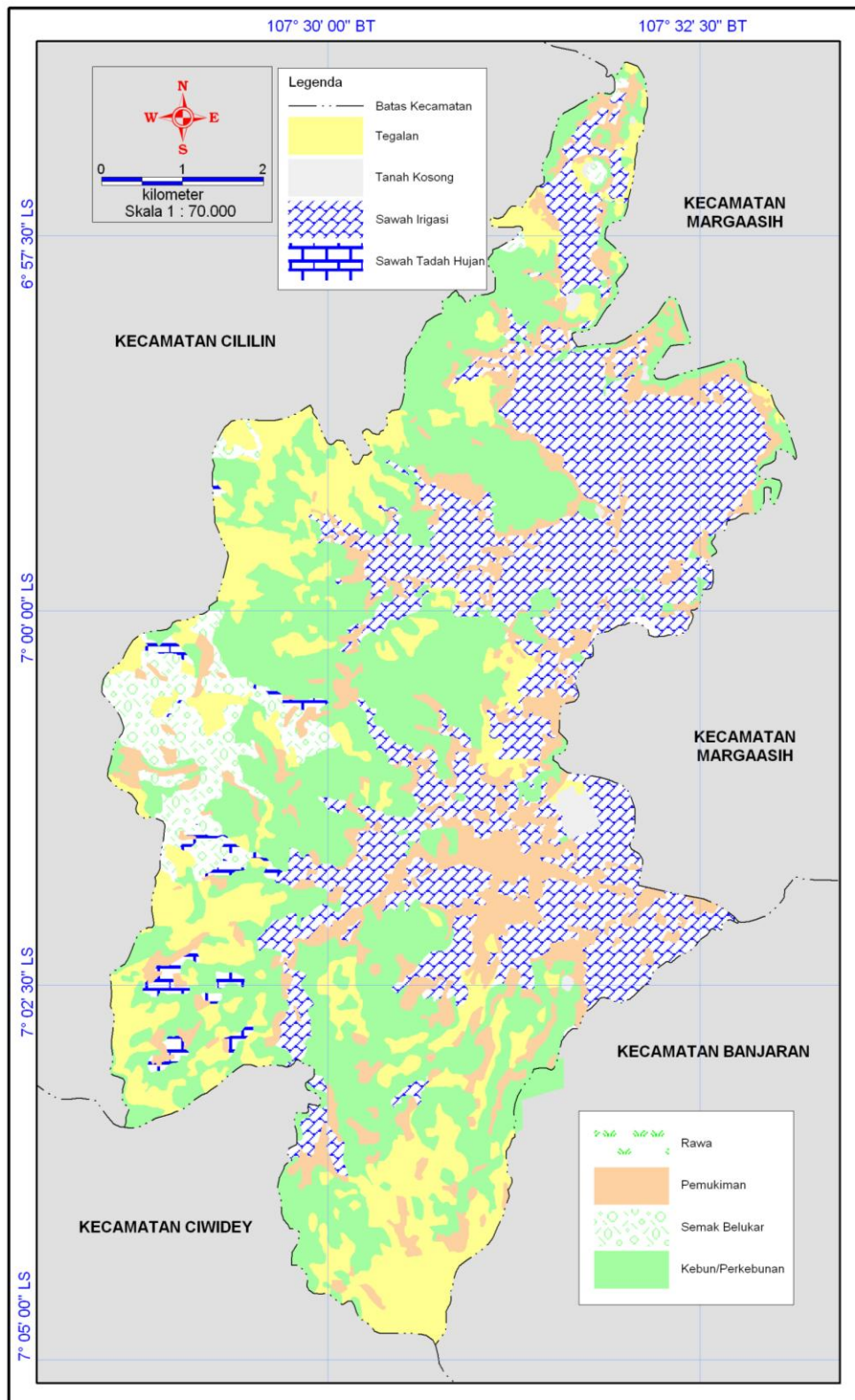


Gambar: 2.1 Rekonstruksi Cekungan Bandung dan lokasi Kecamatan Soreang (Brahmantyo, 2005)

Berdasarkan peta di atas, Soreang terletak pada tepian dari Dataran Danau Bandung Purba. Karena itu, Soreang sebenarnya terbebas dari bahaya banjir kecuali banjir lokal akibat tata lingkungan yang kurang baik. Adapun banjir yang bersifat alami dan terjadi setiap tahun terletak di sepanjang aliran Ci Tarum seperti di Dayeuhkolot, Majalaya, Ciparay, Bojongsoang, dan Margahayu.

Potensi kesuburan tanahnya cukup tinggi. Sebelah baratdaya Soreang merupakan material vulkanik, ke arah timur bentuklah kipas aluvial sedangkan ke arah barat laut merupakan batuan intrusiva. Perhatikan peta penggunaan lahan di Kecamatan Soreang yang didominasi oleh lahan perkebunan dan semakbelukar yang disisipi oleh lahan pertanian di dataran rendah. Penggunaan lahan di atas terkait dengan relief batuan intrusiva yang telah mengalami pelapukan dan tererosi dengan kuat sejak ribuan tahun yang lalu.

PETA PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN SOREANG



TABEL 2.1 PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN SOREANG

Desa	Luas Tanah Sawah (Ha)			Luas Tanah Kering (Ha)		
	Irigasi Teknis	Irigasi 1/2 Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan, bangunan, halaman	Tegal	Pemukiman
Buinagara	8,455	10,873	83	-	154,073	150,400
Cibodas	125	35	5	72	350	-
Cilame	-	-	70	4	408	1
Gajah Mekar	100	30	3	60	0.395	-
Jatisari	138,500	25	178,500	143,523	115,900	-
Jelegong	108,055	36,018	18,009	18,009	108,829	144,074
Keramat Mulya	65	17,693	-	15.25	58	13
Kopo	193.93	-	-	15,150	17,200	23,157
Kutawaringin	137,983	-	1,175	56,511	108,829	-
Padasuka	-	94.68	4,721	52,629	64,879	-
Pamekaran	57,020	-	-	-	-	61,385
Pameuntasan	150	-	-	11,545	5,905	45,300
Panyirapan	-	-	-	-	39,325	20,575
Sadu	52,549	1,620	-	52,376	65,418	155,928
Soreang	157,650	-	-	17	1.00	25.00
Sukajadi	-	-	54	21.77	329,107	466,117
Sukamulya	-	-	84	-	-	-
Sukanagara	-	-	-	382,025	3	10

Hasil analisis dan Rekapitulasi laporan Profil Desa Tahun 2006

B. Aspek Sosial Budaya

Kecamatan Soreang memiliki kedudukan yang khusus karena juga merangkap sebagai ibukota Kabupaten Bandung, sehingga rentang kendali relatif dekat dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Bandung. Kecamatan Soreang terdiri dari 18 desa, sehingga secara administratif sebenarnya tidak terlampaui ideal untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya, jumlah desa yang berada dalam I (satu) kecamatan adalah 10 desa, sehingga kecamatan masih relatif mudah untuk memberikan perhatian maupun pembinaan terhadap desa-desa yang ada di wilayahnya.

Luas wilayah kecamatan Soreang adalah 67.37 17 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 133.048 jiwa, terdiri dari 69.508 jiwa laki-laki dan 63.540 jiwa perempuan. Dengan demikian, tingkat kepadatan penduduknya adalah 1.975 orang per km².

Di Kecamatan Soreang terdapat 266 mesjid, 192 langgar, dan 79 musholla, sedangkan tempat ibadah lainnya seperti gereja, pura, dan vihara tidak ada yang berada di wilayah kecamatan ini. Jumlah sarana olahraga di Kecamatan Soreang memiliki 7 lapangan sepakbola, 4 lapangan bola basket, 108 lapangan bulutangkis, 82 meja tennis meja, 1 lapangan tennis lapangan, 102 lapangan bola volley, 1 fasilitas kolam renang, dan 10 fitness center. Data pada Kecamatan Soreang memperlihatkan bahwa sarana olahraga yang tersedia banyak didominasi oleh sarana olahraga yang dilakukan di tempat terbuka, seperti sepakbola, bola volly dan bola basket. Hal tersebut cukup dimengerti karena jenis olahraga tersebut disukai oleh banyak orang dan dilakukan secara massal.

Partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Soreang terhadap permasalahan kemasyarakatan dapat terwujud dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebanyak 1178 organisasi, partai politik sebanyak 105 organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 4 organisasi dan kelompok Remaja Masjid sebanyak 1162 organisasi.

C. Aspek Pendidikan

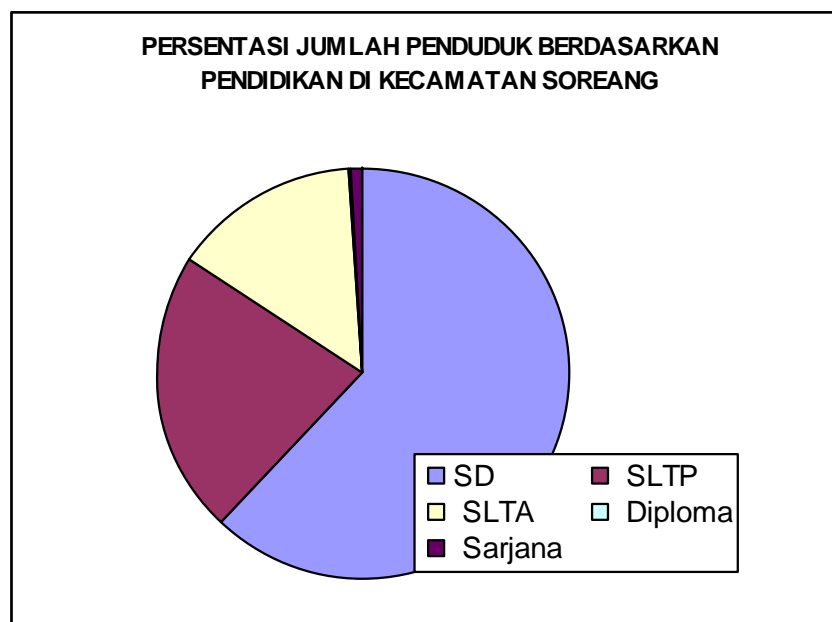
Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Soreang pada umumnya rendah yaitu tingkat SD. Seperti halnya di kecamatan lain di Kabupaten Bandung Kecamatan Soreng memiliki kontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi pendidikan. Indeks pendidikan Kabupaten Bandung sebesar 78,7 pada tahun 1999 termasuk kategori sedang dalam klasifikasi UNDP indeks pendidikannya termasuk sedang dan cenderung melambat perkembangannya. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan indeksnya tidak termasuk tinggi antara daerah lainnya tetap atau konstan. Berikut adalah data tentang jumlah lulusan SD, SLTP, SLTA, Diploma dan sarjana di Kecamatan Soreang.

TABEL JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN LULUSAN PENDIDIKAN DI
KECAMATAN SOREANG

	Total penduduk	Kepadatan (orang/km2)	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
Buninagara	6,150	627	286	278	121	-	17
Cibodas	5,700	-	4,910	1,500	700	-	-
Cilame	4,462	-	3,322	316	171	-	17
Gajah Mekar	7,737	3,868	4,618	415	185	-	39
Jatisari	8,248	-	3,781	798	696	-	7
Jelegong	12,388	305	2,416	-	337	-	5
Keramat Mulya	7,021	33	2,038	1,511	1,158	-	60
Kopo	7,391	0.03	212	1,344	400	-	14
Kutawaringin	5,648	959	4,019	395	201	-	20
Padasuka	8,267	4	5,740	564	502	-	23
Pamekaran	10,202	-	1,029	584	763	-	32
Pameuntasan	-	3,201	139	1,190	1,222	-	75
Panyirapan	6,186	309	1,418	508	201	-	-
Sadu	-	-	1,892	2,819	1,188	-	207
Soreang	15,265	66	1,584	1,056	1,155	152	50
Sukajadi	6,488	0.083	1,352	827	316	-	27
Sukamulya	7,394	670	150	65	26	-	4
Sukanagara	3,934	-	925	-	73	-	2
	122,481	10,042	39,831	14,170	9,415	152	599

Hasil analisis dan Rekapitulasi laporan Profil Desa Tahun 2006

Jika ditampilkan dalam bentuk grafik pie, maka proporsinya akan sangat terlihat bahwa lulusan SD lebih dari 50%.



D. Aspek Politik

Pada tahun 1999, komposisi partai yang termasuk dalam 6 partai meraih suara di kecamatan Soreang adalah PDI-P dengan raihan 24.572 suara, Golkar dengan raihan 20.853 suara, PPP meraih 5.904 suara, PAN sebanyak 3.442 suara, PKB sebanyak 3.660 suara dan PBB sebanyak 6.189 suara. Pada tahun 2004 komposisi ini mengalami perubahan di mana Golkar menempati urutan pertama dengan 29.833 suara, PDI-P dengan 9.880 suara, PKS dengan 5.356 suara, PPP dengan 6.971 suara, Partai Demokrat 4.925 suara dan terakhir adalah PAN dengan 5.810 suara.

Dinamika politik ini sangat menarik karena menunjukkan adanya proses berfikir rasional dalam penggunaan hak pilih dan tidak hanya ikut-ikutan terhadap tokoh masyarakat atau orang lain. Pemilih yang rasional dapat dijadikan indikator bahwa pendidikan demokratisasi sudah mulai berjalan dan merupakan potensi di masa yang akan datang.

E. Aspek Ekonomi

Kemampuan ekonomi Kecamatan Soreang dilihat dari besaran PDRB yang dihasilkan oleh kecamatan ini, yakni sebesar Rp 25.845.022,00. Jumlah tersebut dihasilkan dari sektor pajak daerah sebesar Rp 10.732.960,00 dan retribusi daerah sebesar Rp 8.153.820,00 serta sektor lainnya. Kecamatan ini menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Bandung sebesar Rp 18.886.780,00. Potensi ekonomi masyarakat dari berdasarkan lahannya umumnya diperuntukkan oleh padi, selebihnya dalam jumlah kecil adalah jagung, kedelai, ubi kayu, mentimun, buncis, dan terong. Di bawah ini ditampilkan daftar tabel desa yang memiliki lahan pertanian berdasarkan potensi jenis tanamannya.

**TABEL: POTENSI LUAS LAHAN PERTANIAN BERDASARKAN
JENIS TANAMAN**

Desa	Potensi Pertanian									
	Padi	Menti mun	Jagung	Kedelai	Ubi kayu	Tomat	Cabe	Bawang merah	Buncis	Terong
Buninagara	8,355	-	15	-	12.8	-	-	-	5	-
Cibodas	100	-	0.5	-	2.5	5	-	-	-	-
Cilame	65	-	30	-	5	-	-	-	8	-
Gajah Mekar	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jatisari	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jelegong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keramat Mulya	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopo	175,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutawaringin	137,983	-	-	-	24	0.5	-	-	0.70	0.25
Padasuka	110,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pamekaran	57,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pameuntasan	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
Panyirapan	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sadu	54,164	-	2	6	-	-	-	-	-	-
Soreang	157,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukajadi	40	10	10	-	3	10	15	2	10	7
Sukamulya	3	0.2	0.5	-	-	5	-	-	5	-
Sukanagara	-	-	10	-	-	3	2	3	5	-

Hasil analisis dan Rekapitulasi laporan Profil Desa Tahun 2006

Berapakah potensi yang dimiliki masyarakat dilihat dari kepemilikan lahan pertanian bahan pangan? Di bawah ini ditampilkan tabel bahwa masyarakat yang memiliki lahan pertanian 517.321 RTP sedangkan yang tidak memiliki lahan pertanian 15.332 RTP. Data ini memiliki makna bahwa penduduk Kecamatan Soreang masih banyak yang menjadi buruh tani yang tentu saja dalam penghasilan termasuk tidak menentu.

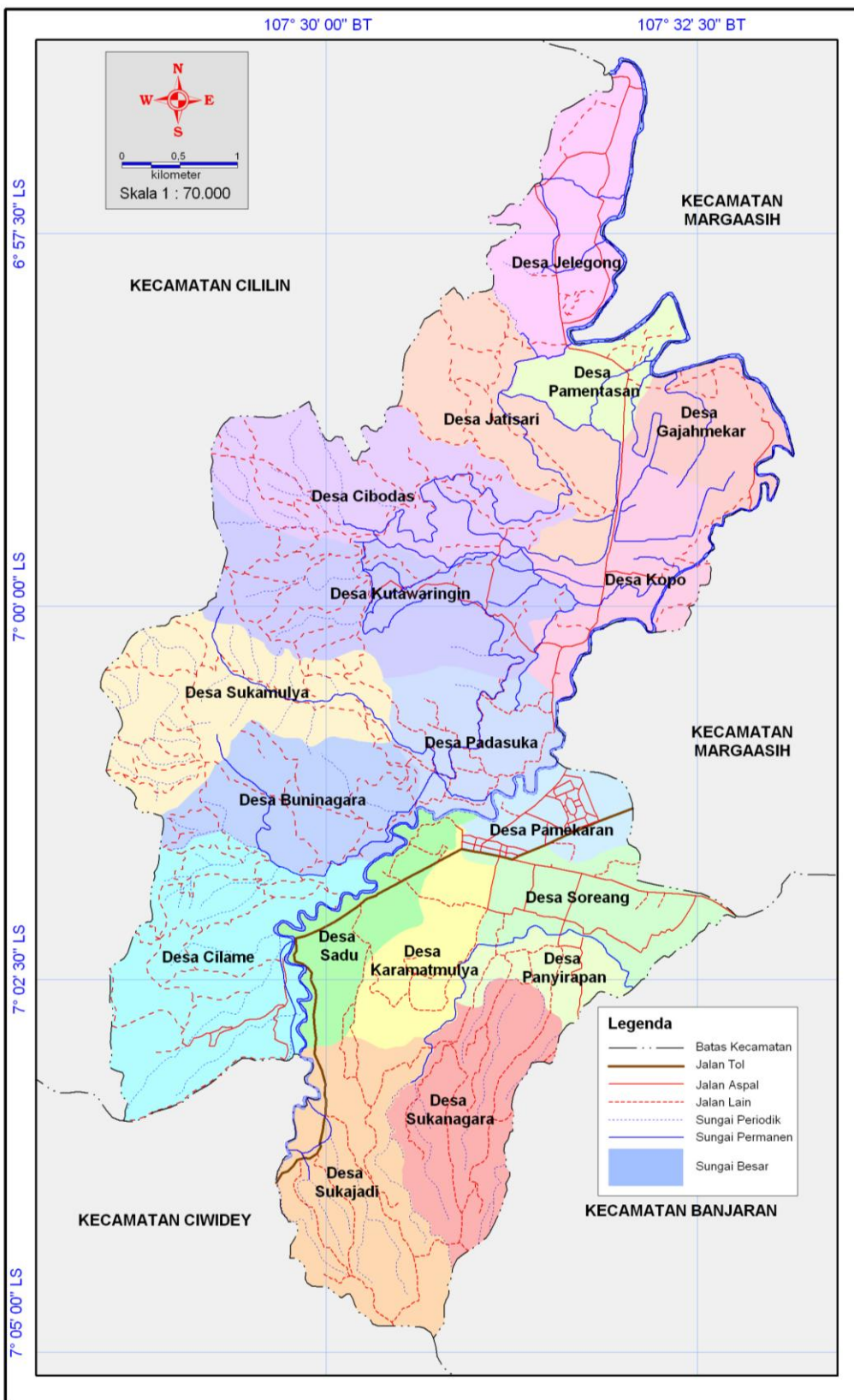
Berdasarkan pengelompokan kepemilikan lahan, yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar berjumlah 7,374 RTP, yang memiliki lahan antara 0,5 – 1,0 hektar berjumlah 3,072 RTP, dan yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar hanya 1,313 RTP. Besarnya jumlah RTP yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar memiliki pengaruh kepada keberagaman perlakuan lahan pertanian. Penanganan lahan pertanian akan banyak ragamnya tergantung kebijakan tiap masing-masing pemilik lahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL PEMILIKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN OLEH RUMAH TANGGA
PERTANIAN (RTP) DI KECAMATAN SOREANG

Desa	Memiliki tanah pertanian (RTP)	Tidak memiliki tanah pertanian (RTP)	Memiliki < 0.5 Ha	Memiliki 0.5-1.0 Ha	Memiliki > 1 Ha	Jumlah total RTP
Buninagara	738	1,529	374	246	118	9,005
Cibodas	1,412	288	-	-	-	1,700
Cilame	157	27	36	78	16	314
Gajah Mekar	210	1,650	190	12	6	2,068
Jatisari	-	-	1,589	150	9	1,748
Jelegong	143	353	71	-	-	567
Keramat Mulya	166	1,893	19	45	22	2,145
Kopo	1,305	197	507	750	825	7,168
Kutawaringin	311	720	250	55	6	1,342
Padasuka	869	1,134	526	338	5	2,872
Pamekaran	138	2,783	68	61	9	3,059
Pameuntasan	1,039	519	917	73	49	2,597
Panyirapan	859	2,639	798	58	3	4,357
Sadu	682	933	399	146	137	2,297
Soreang	-	-	-	-	-	-
Sukajadi	403	371	280	136	26	1,216
Sukamulya	508,321	140	720	425	80	1,873.321
Sukanagara	975	156	630	499	2	2,262
Jumlah	517,728	15,332	7,374	3,072	1,313	46,590

Hasil analisis dan Rekapitulasi laporan Profil Desa Tahun 2006

PETA ADMINISTRATIF KECAMATAN SOREANG



BAB IV

ALTERNATIF PEMEKARAN KECAMATAN SOREANG

A. Pemenuhan Kriteria Pembentukan Kecamatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang kriteria pembentukan kecamatan sebagaimana telah dibahas di awal tulisan yaitu jumlah penduduk untuk di wilayah Jawa dan Bali adalah minimal 10.000 jiwa, dengan luas wilayah tidak kurang dari 7,5 km² dan jumlah desa/kelurahan minimal 4 desa/kelurahan. Untuk yang terakhir Kecamatan Soreang sudah terpenuhi karena jumlahnya 20 buah desa/kelurahan sehingga jika dibagi dua maka masing-masing 10 desa/kelurahan.

Sekaitan dengan itu ada dua skenario pemekaran Kecamatan Soreang, yaitu:

1. Skenario Pertama

Skenario pertama adalah memekarkan Kecamatan Soreang **tanpa menimbulkan konsekwensi** terhadap kecamatan di tetangganya. Artinya tidak mengambil sejumlah desa dari kecamatan lain. Pada Skenario ini, Pemekaran Kecamatan Soreang dibagi dua skenario lagi yaitu:

- a. Kecamatan induk terdiri dari 7 kecamatan yaitu desa Sukajadi, Sukanegara, Sadu, Kramatmulya, Panyirapan, Soreang, dan Pamekaran. Dengan demikian, kecamatan Soreang Pemekaran terdiri dari 11 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameuntasan, Kopo, Cibodas, Kutawaringan, Sukamulya, Padasuka, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Batas pemekaran adalah sungai Ci Widey.

Peta (belum)

TABEL JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SOREANG PEMEKARAN

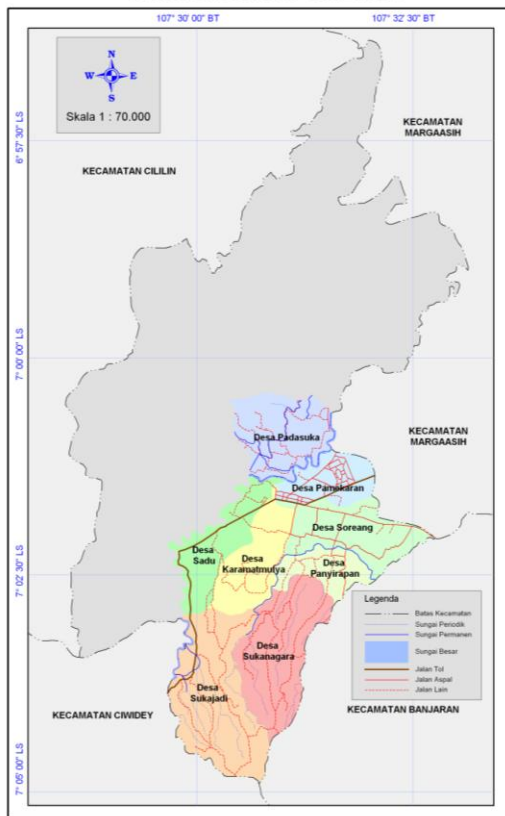
No	Desa	Total penduduk	KK	Kepadatan (orang/km ²)
1	Buninagara	6,150	1,437	627
2	Cibodas	5,700	1,700	-
3	Cilame	4,462	1,284	-
4	Gajah Mekar	7,737	1,971	3,868
5	Jatisari	8,248	2,320	-
6	Jelegong	12,388	2,944	305
7	Kutawaringin	5,648	1,715	959
8	Padasuka	8,267	2,033	4
9	Pameuntasan	-	-	3,201
10	Sukamulya	7,394	1,957	670
11	Kopo	7,391	2,089	0.03
Jumlah		65,994	17,361	9,634

TABEL JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SOREANG INDUK

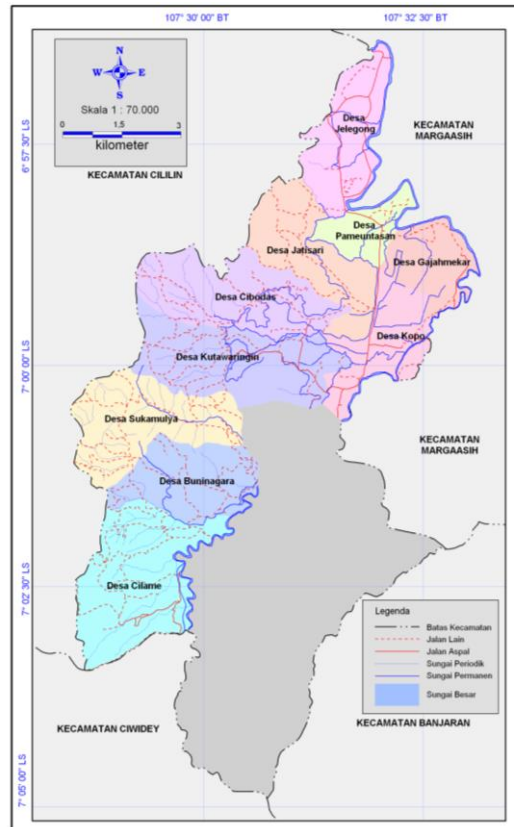
No	Desa	Total penduduk	KK	Kepadatan (orang/km ²)
1	Keramat Mulya	7,021	2,059	33
2	Pamekaran	10,202	2,720	-
3	Panyirapan	6,186	1,710	309
4	Sadu	-	2,252	-
5	Soreang	15,265	4,164	66
6	Sukajadi	6,488	1,780	0.083
7	Sukanagara	3,934	1,131	-
Jumlah		49,096	15,816	408

- b. Kecamatan induk memiliki 8 kecamatan yaitu Desa Sukajadi, Sukanegara, Sadu, Kramatmulya, Panyirapan, Soreang, Pamekaran, dan ditambah Desa Padasuka. Adapun kecamatan Soreang Pemekaran terdiri dari 10 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameuntasan, Kopo, Cibodas, Kutawaringin, Sukamulya, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Batas pemekaran tidak lagi sungai Ci Widey dan tidak berdasarkan teori apapun.

Skenario (b) Soreang Induk



Skenario (b) Soreang Pemekaran



TABEL JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SOREANG PEMEKARAN

No	Desa	Total penduduk	KK	Kepadatan (orang/km ²)
1	Buninagara	6,150	1,437	627
2	Cibodas	5,700	1,700	-
3	Cilame	4,462	1,284	-
4	Gajah Mekar	7,737	1,971	3,868
5	Jatisari	8,248	2,320	-
6	Jelegong	12,388	2,944	305
7	Kutawaringin	5,648	1,715	959
8	Pameuntasan	-	-	3,201
9	Sukamulya	7,394	1,957	670
10	Kopo	7,391	2,089	0.03
		57,727	15,328	9,630

TABEL JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SOREANG INDUK

No	Desa	Total penduduk	KK	Kepadatan (orang/km ²)
1	Keramat Mulya	7,021	2,059	33
2	Pamekaran	10,202	2,720	-
3	Panyirapan	6,186	1,710	309
4	Sadu	-	2,252	-
5	Soreang	15,265	4,164	66
6	Sukajadi	6,488	1,780	0.083
7	Sukanagara	3,934	1,131	-
8	Padasuka	8,267	2,033	4
Jumlah		49,096	15,816	408

Baik skenario (a) maupun skenario (b), dilihat dari pemenuhan kriteria yaitu jumlah penduduk minimal yaitu 10.000 semuanya terpenuhi.

Jika dilihat dari luas daerahnya, baik skenario (a) maupun (b) juga terpenuhi. Pada skenario (a) misalnya, Soreang Induk memiliki luas sekitar 27,8384 km² dan Soreang Pemekaran memiliki luas sekitar 35,783 km². Atau skenario (b) Soreang Induk memiliki luas sekitar 30,167 km² dan Soreang Pemekaran sekitar 33,455 km² kedua skenario di atas melebihi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

2. Skenario Kedua

Skenario kedua adalah memekarkan Kecamatan Soreang **dengan cara menimbulkan** konsekwensi terhadap kecamatan di tetangganya. Artinya mencoba mengambil sejumlah desa dari kecamatan lain. Pada Skenario ini, Kecamatan Soreang pemekaran terdiri dari 11 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameantasan, Kopo, Cibodas, Kutawaringan, Sukamulya, Padasuka, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Dengan demikian, formasi kecamatan Soreang Pemekaran sama dengan skenario pertama bagian (a) dengan batas wilayah pemekaran adalah sungai Ci Widey. Hal yang berbeda pada skenario ini, Soreang Induk "menagmbil" desa dari kecamatan tetangganya yaitu dari Kecamatan Katapang tepatnya Desa Cingcin, Desa Sekarwangi, dan Desa Parungserab. Perhatikan dua pasangan peta pemekaran Soreang dalam skenario dua.

Pengambilan tiga desa tetangganya bukanlah merupakan masalah karena merupakan hak dan kewenangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Hal yang perlu diperhitungkan biayanya adalah penyediaan KTP bagi penduduk pemekaran karena ribuan penduduk akan menjadi "korban" dalam pemekaran kabupaten.

Peta (belum)

Skenario kedua juga tidak memiliki hambatan baik dari jumlah penduduk maupun luas wilayah yang dipersyaratkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000.

BAB V

PEMILIHAN LOKASI IBUKOTA KECAMATAN PEMEKARAN SOREANG

Untuk pemilihan lokasi ibukota Kecamatan Pemekaran Soreang dalam tulisan ini akan difokuskan pada Kecamatan Soreang Pemekaran. Artinya, untuk efisiensi ibukota kecamatan Soreang Induk diasumsikan masih tetap seperti yang sekarang telah ada. Dengan dasar pemikiran ini maka studi tentang pemilihan lokasi ibukota hanya akan memperhitungkan desa-desa yang termasuk pada rencana kecamatan pemekaran. Khusus dalam proses penetapan ibukota, Desa Pasuka akan diikutsertakan atau dilibatkan.

Faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ibukota kecamatan antara lain aspek aksesibilitas, perkembangan desa, tempat yang sentral, dan karakteristik wilayah yang dalam hal ini difokuskan pada morfologi dan keindahan lokasi yang cocok untuk kantor kecamatan.

Berikut adalah proses pemilihan lokasi ibukota Kecamatan Soreang dengan teknik *skoring*. Metode Penghitungan (*scoring*) per indikator untuk menyusun kategori penilaian berdasarkan skala tertentu dan atau dirangking. Skor yang paling besar mendapat prioritas untuk dipilih sebagai calon ibukota Soreang Pemekaran.

Selain skoring dilakukan pula analisis lokasi dan pertimbangan secara kualitatif terhadap aspek geomorfologi dan keindahan. Faktor ini dipertimbangkan guna memantapkan dalam pengambil keputusan.

1. Dilalui oleh jalan antar kota

	Sarana Transportasi				Skor
	Dilalui Keretek	Dilalui bus	Dilalui Angkot	Dilalui alteri	
Buninagara	1	1	1	1	4
Cibodas	1	1	3	1	4
Cilame	1	1	3	1	6
Gajah Mekar	1	1	3	3	8
Jatisari	1	1	3	1	6
Jelegong	3	1	3	3	10
Kopo	3	1	3	1	8
Kutawaringin	3	1	3	3	10
Padasuka	3	1	3	3	10
Pameuntasan	3	1	3	1	8
Sukamulya	3	1	3	3	10

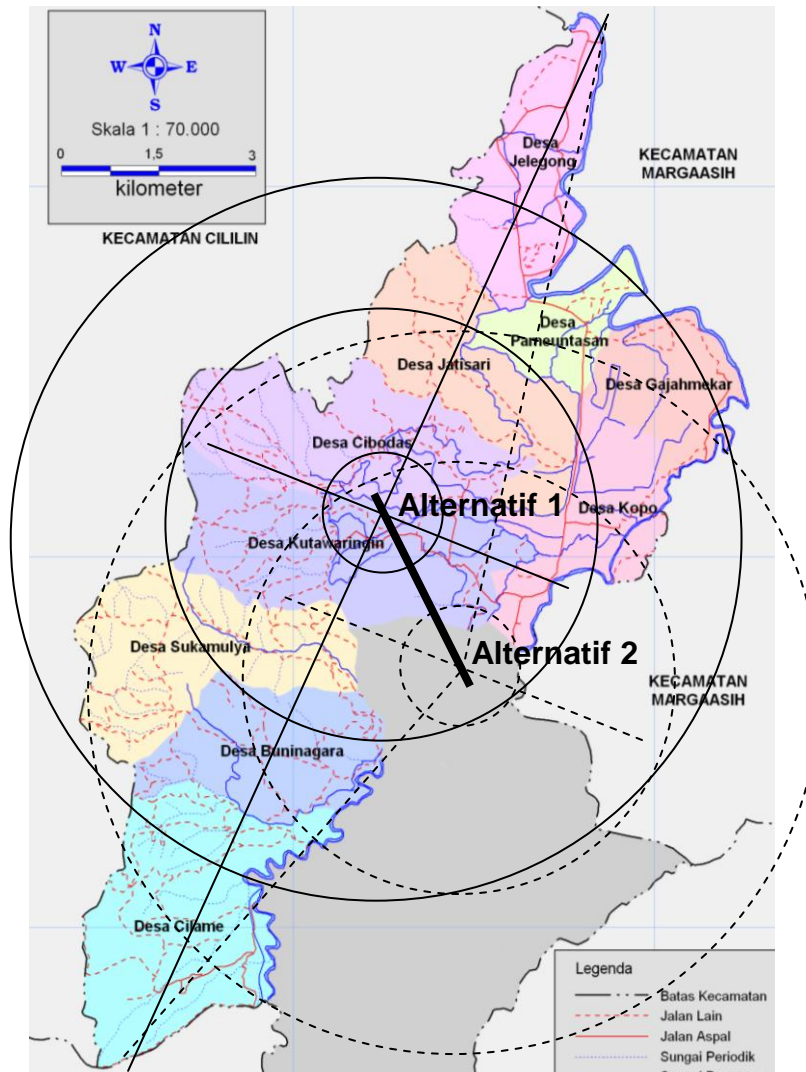
Berdasarkan data lain tentang jalan dengan jenis jalan aspal, nampaknya hanya Desa Kutawaringin yang dilalui oleh jalan aspal sepanjang 45 km dengan kondisi baik, dan yang rusak sekitar 7,5 km. Dengan demikian, Kutawaringin memiliki skor yang paling tinggi diantara desa yang lainnya.

2. Potensi Desa (Kategori Desa)

NO	DESA	JUMLAH TOTAL SKOR	MASUK KATEGORI
1	Buninagara	-	-
2	Cibodas	43	Sangat Maju
3	Cilame	40	Maju
4	Gajah Mekar	52	Sangat Maju
5	Jatisari	42	Sangat Maju
6	Jelegong	44	Sangat Maju
7	Kopo	48	Sangat Maju
8	Kutawaringin	44	Sangat Maju
9	Padasuka	39	Maju
10	Pameuntasan	48	Sangat Maju
11	Sukamulya	38	Maju

3. Tempat yang sentral

Tempat yang sentral merupakan konsep jarak absolut antar daerah tanpa melihat saran transportasi yang ada. Artinya faktor yang akan diperhitungkan hanya pada titik tengah dari



NO	DESA		
1	Buninagara	Lingaran 2	2
2	Cibodas	Lingaran 1	3
3	Cilame	Lingaran 3	1
4	Gajah Mekar	Lingaran 3	1
5	Jatisari	Lingaran 2	2
6	Jelegong	Lingaran 3	1
7	Kopo	Lingaran 2	2
8	Kutawaringin	Lingaran 1	3
9	Padasuka	Lingaran 2	2
10	Pameuntasan	Lingaran 2	2
11	Sukamulya	Lingaran 2	2

4. Aspek morfologi dan keindahan

Sebelum memilih berdasarkan morfologi dan aspek keindahan, nampaknya perlu melokalisir alternatif pilihan.

- a. Berdasarkan aspek aksesibilitas, diperoleh empat desa nominasi yaitu Jelegong, Kutawaringn, Padasuka, dan Sukamulya. Namun berdasarkan data monografi, Kutawaringin lebih unggul.
- b. Berdasarkan kategori desa, Kutawaringin dan Jelegong memiliki prestasi sangat baik dengan demikian, pilihan kepada dua desa tersebut cukup beralasan.
- c. Berdasarkan kategori ketiga yaitu tempat yang sentral, ternyata Kutawaringin menempati kedudukan yang juga terbaik.

Dengan tiga langkah di atas sebenarnya cukup rasional jika memilih Kutawaringin sebagai pusat atau ibukota Kecamatan Soreang pamekaran. Namun untuk memantapkan atau meyakinkan ketepatan pemilihan lokasi, perlu juga dilihat secara geomorfologi dan keindahan.

Dengan melihat peta Rupa Bumi skala 1 : 25.000, Kutowaringan merupakan daerah Perbukitan Sindy dan nampaknya agak terpencil diantara perbukitan. Oleh karena itu, untuk lokasi kantor kecamatan lebih baik di sebelah utara tepatnya di kaki perbukitan Sindy. Lokasinya cukup indah karena menghadap perbukitan Cicangkud dan Pasir Cimahi di seberang pesawahan.

Alternatif 1

Desa Alternatif	Skor Akses	Kategori Desa	Tempat Sentral	Geomorfologi dan keindahan
Jelegong	10	44	-	
Kutawaringin	10	44	3	Kaki perbukitan yang bertepi dengan persawahan sempit menghadap perbukitan kecil. Sangat Indah dan nyaman.
Padasuka	10	-		
Sukamulya	10	-	-	

Hasil analisis 2007

Alternatif 2

Desa Alternatif	Skor Akses	Kategori Desa	Tempat Sentral	Geomorfologi dan keindahan
Jelegong	10	44	-	
Kutawaringin	10	44	3	
Padasuka	10	39	3 *)	View lokasi Padasuka relatif terbuka di sebelah timur. Geomorfologi relatif aman dan keindahannya tidak kalah dengan desa yang lain.
Sukamulya	10	-	-	

**) Tempat sentral yang lain dengan lingkaran yang berpusat dari Padasuka*

Hasil analisis 2007

Baik Kutawaringin maupun Padasuka memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini tidak memiliki informasi aspek politik yang berkembang saat ini yang bersifat aktual. Oleh karena itu, diharapkan dalam proses penetapan keputusan kiranya dikaji secara politik dan aspek teknis lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

REKOMENDASI

Di akhir tulisan kiranya perlu diajukan rekomendasi sebagai bagian dari kecenderungan sikap dari hasil studi ini. Adapun rekomendasi pokok yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk alternatif pemekaran Kecamatan Soreang penelitian ini menemukan dua alternatif yaitu:
 - a. Skenario pertama adalah memekarkan Kecamatan Soreang **tanpa menimbulkan konsekwensi** terhadap kecamatan di tetangganya. Artinya tidak mengambil sejumlah desa dari kecamatan lain. Pada Skenario ini, Pemekaran Kecamatan Soreang dibagi dua skenario lagi yaitu:
 - Kecamatan induk terdiri dari 7 kecamatan yaitu desa Sukajadi, Sukanegara, Sadu, Kramatmulya, Panyirapan, Soreang, dan Pamekaran. Sedangkan Kecamatan Soreang Pemekaran terdiri dari 11 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameuntasan, Kopo, Cibodas, Kutawaringan, Sukamulya, Padasuka, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Batas pemekaran adalah sungai Ci Widey.
 - Kecamatan induk memiliki 8 kecamatan yaitu Desa Sukajadi, Sukanegara, Sadu, Kramatmulya, Panyirapan, Soreang, Pamekaran, dan ditambah Desa Padasuka. Adapun kecamatan Soreang Pemekaran terdiri dari 10 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameuntasan, Kopo, Cibodas, Kutawaringan, Sukamulya, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Batas pemekaran tidak lagi sungai Ci Widey dan tidak berlandasarkan teori apapun.
 - b. Skenario kedua adalah memekarkan Kecamatan Soreang **dengan cara menimbulkan** konsekwensi terhadap kecamatan di tetangganya. Artinya mencoba mengambil sejumlah desa dari kecamatan lain. Pada Skenario ini, Kecamatan Soreang pemekaran terdiri dari 11 desa yaitu Jelegong, Jatisari, Pameuntasan, Kopo,

Cibodas, Kutawaringan, Sukamulya, Padasuka, Buninagara, Gajah Mekar, dan Cilame. Adapun Soreang Induk perlu “mengambil” desa dari kecamatan tetangganya yaitu dari Kecamatan Katapang tepatnya Desa Cingcin, Desa Sekarwangi, dan Desa Parungserab. Perhatikan dua pasangan peta pemekaran Soreang dalam skenario dua.

2. Penetapan lokasi desa yang paling baik untuk dijadikan ibukota Kecamatan Soreang Pemekaran didasarkan pada hasil studi aspek aksesibilitas, perkembangan desa, tempat yang sentral, dan karakteristik wilayah yang dalam hal ini difokuskan pada morfologi lokasi dan keindahan yang cocok untuk kantor kecamatan. Hasilnya mengajukan dua alternatif desa yaitu Desa Kutawaringin atau Desa Padasuka.
3. Semua proses studi ini terlepas dari unsur politik, karena itu jika dalam pelaksanaannya memiliki unsur politik tertentu sepenuhnya diserahkan kepada pengambil keputusan.

